

**PRESS RELEASE**

**PAGUYUBAN LENDER DANA SYARIAH INDONESIA**

**Jakarta, 4 Desember 2025**

**PAGUYUBAN LENDER DSİ MENGECAM KEGAGALAN MANAJEMEN, MENUNTUT TRANSPARANSI TOTAL, DAN MEMPERTANYAKAN SIAPA SEBENARNYA YANG MENGENDALIKAN PT DANA SYARIAH INDONESIA**

Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia dengan ini menyampaikan sikap resmi dan sangat tegas atas hasil pertemuan virtual (Zoom Meeting) dengan manajemen PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Alih-alih membawa harapan, pertemuan tersebut bagaikan pungguk merindukan bulan.Pertemuan tersebut menjadi momen yang memperlihatkan **betapa kacau, lemahnya tata kelola, dan betapa minimnya kemampuan manajemen memahami kondisi keuangan perusahaan** yang selama ini menghimpun dana masyarakat dan berada di bawah pengawasan OJK.

Pertemuan itu kembali menegaskan:

- **Data lender tidak akurat,**
- **Direksi tidak memahami arus kas perusahaan,**
- **Ekuitas berubah signifikan tanpa mereka tahu sebabnya,**
- **Progres penagihan borrower hampir nol,**
- **Kas perusahaan stagnan,**
- **dan rencana pemulihan tidak ada bentuknya.**

Semua ini bukan lagi sekadar tanda bahaya — tapi **alarm kebakaran yang sudah meraung-raung.**

---

**1. Klaim Dana Rp 3,5 Miliar untuk 14.000 Lender: Tidak Masuk Akal & Tidak Dapat Diverifikasi**

DSI mengklaim hanya memiliki **Rp 3,5 miliar dana pemulihan** untuk dibagikan ke **14.000 lender**. Tapi yang lebih mengejutkan — **mereka sendiri tidak yakin dengan data lender mereka.**

Jadi, bukan hanya jumlah dananya yang kecil, tapi *data penerimanya pun tidak jelas*. Untuk perusahaan yang **wajib rapi, diaudit, diawasi OJK** dan **sudah bersertifikasi ISO**, fakta bahwa mereka **tidak tahu data lender-nya sendiri** adalah bentuk **kelalaian fatal**, bahkan bisa disebut **malapratik pengelolaan**.

Ini semua disampaikan langsung dalam pertemuan — bukan asumsi.

---

## **2. Dana 0,2% dari Total Kewajiban: Pukulan Bagi Lender yang Sudah Terluka**

Paguyuban menyoroti fakta bahwa **nilai Rp 3,5 miliar tersebut hanya 0,2% dari total kewajiban DSI** kepada lender. Angka ini bukan saja kecil — ini **menghina akal sehat**.

Lender yang menjadi korban bukan hanya investor biasa. Mereka adalah:

- Pensiunan,
- Korban PHK,
- Orang tua tunggal,
- Orang tua yang menyiapkan pendidikan anak,
- Rakyat kecil,
- Serta anak muda yang mulai membangun masa depan.

Mereka berharap solusi konkret. Namun yang diberikan DSI: **data yang tidak akurat, dana yang tidak mencukupi, dan rencana pemulihan yang tidak ada bentuknya**.

Tidak ada progres penagihan borrower.

Tidak ada peningkatan kas.

Tidak ada perkembangan berarti sejak Oktober.

Hanya janji — tanpa eksekusi. Mereka korban janji manis, “Apapun Profesimu Produktifkan di Dana Syariah”

---

## **3. Direksi Tidak Mengetahui Cash-In & Perubahan Ekuitas: Pertanyaan Siapa Sebenarnya yang Mengurus Perusahaan?**

Bagian paling memprihatinkan — sekaligus paling mengejutkan — muncul saat Paguyuban mempertanyakan hal paling dasar:

- **Posisi cash-in perusahaan, dan**
- **Perubahan ekuitas signifikan pada tahun 2025.**

Namun TA — yang menjabat sebagai direksi sekaligus orang yang disebut memahami akuntansi — secara terbuka menyatakan **tidak tahu** mengenai kedua hal tersebut.

Ini bukan lagi red flag. Ini **bendera merah raksasa ukuran billboard bundaran HI**.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar:

1. **Bagaimana mungkin direksi tidak mengetahui arus kas perusahaan sendiri?**
2. **Apakah TA benar-benar seorang direksi, atau ada “direksi di atas direksi” yang sebenarnya mengendalikan DSI?**
3. **Jika TA tidak tahu cash-in dan ekuitas, lalu siapa yang menyusun laporan akuntansinya?**

#### **4. Kepada siapa laporan keuangan DSI sebenarnya disampaikan?**

Ketidaktahuan semacam ini bukan sekadar kelemahan internal — ini indikasi **ketidakteraturan struktural**, bahkan potensi adanya **pihak yang beroperasi di luar struktur resmi**.

---

#### **4. Janji Pencairan 8 Desember Tidak Selaras dengan Realitas Kas yang Hanya 0,2%**

DSI menjanjikan pencairan dana mulai **8 Desember 2025**.

Namun kembali lagi — dengan dana hanya **0,2% dari total kebutuhan setara Rp 3.500.000.000**, bagaimana mungkin DSI bisa menjanjikan pemulihan **100% dalam waktu kurang dari setahun**?

Secara matematika saja tidak masuk akal.

Secara logika bisnis pun tidak mungkin.

Dalam hampir dua bulan sejak Oktober:

- Tidak ada progres penagihan borrower,
- Tidak ada kenaikan kas,
- Tidak ada rencana pemulihan yang konkret.

Namun janji pencairan tetap diumbar. Ini membuat janji tersebut terdengar bukan seperti rencana, tetapi **pengalihan isu sementara**.

---

#### **5. Temuan Over Appraisal: Penyimpangan yang Merugikan Lender**

DSI juga menjelaskan salah satu penyimpangan yang terjadi: **over appraisal**.

Akibatnya:

- nilai jaminan pada saat penjualan **lebih rendah dari kewajiban**,
- sehingga tidak mampu menutupi nilai yang seharusnya dikembalikan kepada lender.

Dengan kata lain, penilaian jaminan yang tidak realistik di masa lalu kini menjadi beban yang harus ditanggung lender.

---

#### **6. Paguyuban Menuntut Penyaluran Dana Rp 3,5 Miliar Secara Proporsional & Transparan**

Paguyuban Lender DSI menegaskan tuntutan:

- **Seluruh dana Rp 3,5 miliar** — berapapun angka realnya — harus segera disalurkan secara proporsional kepada lender **dengan data yang valid**.
- Tidak ada alasan tambahan.
- Tidak ada penundaan.

- Tidak ada permainan angka.
- Tidak ada manuver internal.

Uang tersebut adalah hak lender, MILIK LENDER, bukan komoditas untuk diputarbalikkan oleh manajemen. KAMI ADALAH KORBAN DAN KAMI AKAN MEMPERTAHANKAN HAK-HAK KAMI.

---

## 7. Extra Balance Sheet Yang Belum Bisa Dibuka ke Publik

DSI menyampaikan bahwa mereka memiliki **extra balance sheet** yang berisi:

- aliran dana lender masuk,
- penyaluran dana ke borrower secara lengkap, dan
- rincian posisi borrower.

Namun dokumen tersebut **tidak dapat ditampilkan sekarang**, karena dianggap sensitif dan harus menunggu izin OJK. DSI menjanjikan dokumen ini akan disampaikan setelah tanggal **10 Desember 2025, dengan catatan jika OJK mengizinkan**.

---

## 8. Sumber Cash-In yang Diupayakan DSI Masih Bersifat ‘Rencana’, Bukan Realisasi

DSI memaparkan empat sumber utama cash-in yang sedang mereka upayakan:

### a. Penagihan ke Borrower

Masalahnya, progres sejak Oktober **mendekati nol**.

### b. Penjualan Aset Jaminan Borrower

Termasuk membuka opsi agar **lender ikut membeli** aset jaminan tersebut — sebuah usulan yang menimbulkan tanda tanya besar tentang efektivitas manajemen.

### c. Penjualan Aset Perusahaan

Termasuk **3 unit kantor DSI di SCBD**, di mana **1 unit sudah ditawarkan secara aktif**.

### d. Investor Asing & Lokal

Masih tahap eksplorasi awal, tanpa nominal pasti, tanpa timeline jelas.

Keseluruhan sumber ini masih **sebatas rencana**, tanpa realisasi signifikan.

---

## 9. Sikap Tegas Paguyuban: Tidak Mau Jadi Pengawas BPP & Siap Ambil Langkah Hukum

Paguyuban, mewakili ribuan lender di seluruh Indonesia, menegaskan:

- **Menolak** dilibatkan sebagai pengawas BPP (karena itu bukan tanggung jawab lender, melainkan manajemen perusahaan).

- **Menolak** segala upaya DSI melempar tanggung jawab kepada lender.
- **Akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak lender**, baik melalui jalur hukum maupun mekanisme lain apabila DSI terus gagal memberikan transparansi, kepastian, dan komitmen nyata.
- **Akan terus mengawal proses pemulihan hingga tuntas.**

Masalah DSI bukan sekadar keterlambatan pencairan — tetapi **indikasi kuat kegagalan tata kelola, kelemahan manajemen, dan ketidaktransparan yang sistematis**.

Paguyuban tidak akan diam, tidak akan mundur, dan tidak akan berhenti sampai seluruh kebenaran terungkap dan dana lender dipulihkan. Paguyuban juga menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat telah hancur, dan **DSI wajib bertanggung jawab penuh atas kekacauan ini**. Tidak ada ruang untuk alasan, penundaan, atau ketidakjelasan lebih lanjut.

Lebih jauh, Paguyuban menegaskan bahwa **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** sebagai lembaga pengawas yang memiliki mandat untuk memastikan transparansi, integritas, dan tata kelola industri keuangan **ikut bertanggung jawab** dalam memastikan kasus ini diselesaikan secara tuntas.

OJK wajib:

- memastikan DSI menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan lengkap,
- mengawasi proses investigasi, pemulihan, dan pencairan dana lender,
- menindak setiap pelanggaran yang ditemukan,
- dan menjamin bahwa seluruh mekanisme perlindungan konsumen **berjalan sebagaimana mestinya**.

Paguyuban menegaskan bahwa **tidak ada toleransi bagi kelalaian pengawasan**, terlebih ketika ribuan lender menjadi korban. Pengawasan OJK tidak boleh sebatas administratif, tetapi harus **proaktif, tegas, dan transparan**, karena mandat perlindungan konsumen bukan hanya slogan, tetapi tanggung jawab hukum dan moral.